

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA**  
**PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR**  
**PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI**  
**ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

Tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 September 2021  
SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti





LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN  
UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2021  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama  | Unit Organisasi Eselon II                           |
|-----|---------------------|---|---|
| 1   | Penanggung Jawab    | Shahandra Hanitiyo                            | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |
| 2   | Ketua               | Muhammad Adiwibowo<br>Soedarmo                | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |
| 3   | Sekretaris          | Sulmiari                                      | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |
| 4   | Anggota             | 1. Mia Diana Putri<br>Suryadi                 | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |
|     |                     | 2. Chyntia Felicia Manda<br>Yemima Situmorang | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |

|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
|  |  | 3. Deddy Andrianto            | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 4. Adi Irawan                 | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 5. Gendy Marthatomo Rachmanto | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 6. Hans Heru Troyas           | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 7. Nur Hartoyo                | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 8. Rati Karimah               | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 9. Andi Setya Nugraha         | Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum             |
|  |  | 10. Himawan Aditya Perdana    | Inspektorat   |
|  |  | 11. Mexi Osmond Soyan         | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa            |
|  |  | 12. Ahmad Wiza Walady         | Biro Perencanaan dan Keuangan                                   |
|  |  | 13. Martdetiara Dewi Kartika  | Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia                  |
|  |  | 14. Annisa Putri              | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum   |
|  |  | 15. Rizki Arif Sudrajat       | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |
|  |  | 16. Rahmat Fitriadi Herman    | Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional |
|  |  | 17. Rahmah Febrina            | Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan        |
|  |  | 18. Moses Alfredo Samodara    | Direktorat Pengembangan Sistem Katalog                          |

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
|  |  | 19. Eska Pratama Dian<br>Kurniawan | Direktorat Pengembangan Sistem<br>Pengadaan Secara Elektronik |
|  |  | 20. Firdo Budi Prasetyo            | Direktorat Pengembangan Profesi                               |
|  |  | 21. Tri Angga Putra<br>Pamungkas   | Direktorat Sertifikasi Profesi                                |
|  |  | 22. Kartika Fitriyani              | Direktorat Advokasi Pemerintah<br>Pusat                       |
|  |  | 23. Paramitha Agdina<br>Pusparini  | Direktorat Advokasi Pemerintah<br>Daerah                      |
|  |  | 24. Carolina Maria<br>Anggreini    | Direktorat Penanganan<br>Permasalahan Hukum                   |

SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd  
ROBIN ASAD SURYO